

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENGGUGAT DIREKSI
PERSEROAN ATAS TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN PERSEROAN**

TESIS

Oleh

SIMON ALEX PASARIBU

2402190022



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENGGUGAT DIREKSI
PERSEROAN ATAS TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN PERSEROAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SIMON ALEX PASARIBU

2402190022



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Alex Pasaribu
Nim : 24021980022
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menggugat Direksi Perseroan Atas Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Perseroan"

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Januari 2026



Simon Alex Pasaribu
NIM: 24021980022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS MENGGUGAT DIREKSI PERSEROAN ATAS
TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PERSEROAN**

Oleh :

Nama : Simon Alex Pasaribu
Nim : 24021980022
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 02 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H
NUPTK: 7252746647130100


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H
NUPTK: 1237749650130143

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H
NUPTK: 1237749650130143

Dekan
Fakultas Hukum




Dr. Hendri Javadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

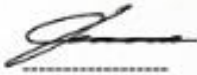
Pada tanggal 02 Februari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

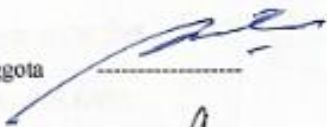
Nama : Simon Alex Pasaribu
Nim : 24021980022
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENGGUGAT DIREKSI PERSEROAN ATAS TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PERSEROAN

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H	Sebagai Ketua	
---	---------------	---

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
-----------------------------------	-----------------	---

3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
---------------------------------	-----------------	---



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Simon Alex Pasaribu
Nim : 24021980022
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menggugat Direksi Perseroan Atas Tindakan yang Mengakibatkan Kerugian Perseroan

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan sata mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, Januari 2026

Simon Alex Pasaribu
NIM: 24021980022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala mukjizat, rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menggugat Direksi Perseroan Atas Tindakan yang Mengakibatkan Kerugian Perseroan”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran, khususnya sebagai bahan rekomendasi dan rujukan bagi institusi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, agar lebih memperhatikan aspek hukum serta ketentuan yang berlaku dalam menjalin suatu perikatan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, maupun pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam bidang hukum kontrak dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing yang benar-benar totalitas untuk terselesainya Tesis ini, penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.,H, M.,H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.,H, M.,H, selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).

2. Prof. Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Pascasarjana UKI, terutama buat Mas Sakal dan Mas Vanry atas ilmu, dukungan, dan pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Keluarga besar Penulis, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral yang tidak pernah putus. Istriku dan anakku yang selalu support dan turut mendoakan.
7. Teman-teman seperjuangan, terutama Yuliana, Lae Pardamean, Eprina, Yoshanda, dan semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini ke depan.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan hukum positif mengenai kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan hukum terhadap direksi. Harapannya karya Tesis ini dapat menjadi bahan kajian untuk para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan serta masyarakat luas.

Jakarta, 02 Februari 2025

Simon Alex Pasaribu

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji	iv
Halaman Pernyataan Publikasi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
Abstract	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teori	10
a. Teori Perlindungan Hukum Positif (Fidusia)	10
b. Teori <i>Business Judgement Rule</i>	19
2. Kerangka Konsep	29
a. Pemegang Saham Minoritas	29
b. Direksi	30
c. <i>Legal Standing</i>	31
d. <i>Derivative Action</i>	32
e. Organ Perseroan	32

F. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	35
a. Pendekatan Perundang-undangan	35
b. Pendekatan Analitis	36
3. Jenis dan Sumber Data	37
a. Bahan Hukum Primer	37
b. Bahan Hukum Sekunder	37
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Teknik Analisis Data	39
6. Orisinalitas Penelitian	39
G. Struktur Penelitian	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	53
A. Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Teori	53
1. Teori Perlindungan Hukum Positif (Fidusia)	53
2. Teori <i>Business Judgement Rule</i>	57
B. Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Konsep	62
1. Pemegang Saham Minoritas	62
2. Direksi	64
3. <i>Legal Standing</i>	67
4. <i>Derivative Action</i>	69
5. Organ Perseroan	71
BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIREKSI	
A. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas	74
B. Kewenangan Pemegang Saham Minoritas dalam Mengajukan Tindakan Hukum	83
C. Landasan Hukum Gugat Pemegang Saham Minoritas Terhadap Direksi	92
D. Syarat Dan Prosedur Pengajuan Gugatan Derivatif	103

E. Batasan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Hak Gugatan Pemegang Saham Minoritas	1
16	

BAB IV BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI ATAS KERUGIAN DANA PERSEROAN- ----- 133

A. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Direksi Dalam Hukum Perseroan -----	133
B. Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Perdata Direksi -----	1
43	
C. Standar Kesalahan, Kelalaian, Dan Hukubang Kausalitas Kerugian Perseroan -----	154
D. <i>Business Judgement Rule</i> Sebagai Pembatas Pertanggungjawaban Perdata Direksi -----	162
E. Bentuk Pemulihan Dan Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Perdata Direksi -----	172

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	187
B. Saran -----	188

DAFTAR PUSTAKA -----	190
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan hukum terhadap direksi yang menyebabkan kerugian dana perseroan, dalam perspektif hukum perseroan dan hukum pidana korporasi Indonesia, dengan fokus pada mekanisme gugatan derivatif serta penerapan doktrin *business judgment rule* sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder serta putusan pengadilan, disertai studi perbandingan dengan beberapa negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura untuk menilai kecukupan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan kesesuaian adopsi doktrin *common law* dalam sistem *civil law* Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah mengakui mekanisme gugatan derivatif dan mengadopsi substansi *business judgment rule* untuk menyeimbangkan akuntabilitas direksi dan keleluasaan pengambilan keputusan bisnis, tingginya ambang batas kepemilikan saham untuk memperoleh legal standing, kesenjangan informasi, hambatan pembuktian, serta belum jelas dan konsistennya standar yurisprudensi menyebabkan mekanisme tersebut belum efektif melindungi pemegang saham minoritas, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penurunan ambang batas kepemilikan, penegakan standar pembuktian, dan perumusan yang lebih tegas mengenai batas perlindungan *business judgment rule* agar tidak berubah menjadi instrumen impunitas bagi direksi.

Kata kunci: Pemegang Saham Minoritas, Gugatan Derivatif, *Business Judgment Rule*.

ABSTRACT

This research examines the legal position and authority of minority shareholders to initiate legal actions against directors whose decisions cause losses to the company's funds, within the framework of Indonesian corporate law and corporate criminal liability, with particular emphasis on the derivative action mechanism and the application of the business judgment rule under Article 97 of the Indonesian Company Law.

Using a normative legal research method and employing statutory, analytical, and case approaches, this study analyzes primary and secondary legal materials, including court decisions, and conducts comparative assessments with common law jurisdictions such as the United States, the United Kingdom, Australia, and Singapore to evaluate the adequacy of minority shareholder protection and the compatibility of common law doctrines with Indonesia's civil law system.

The findings indicate that although Indonesian law formally recognizes derivative actions and incorporates the substance of the business judgment rule to balance directors' accountability and business discretion, high quantitative thresholds for legal standing, information asymmetry, evidentiary difficulties, and the lack of clear and consistent jurisprudential standards have constrained the effectiveness of these mechanisms, thereby necessitating regulatory refinement, lowering of ownership thresholds, clarification of evidentiary standards, and a more precise delineation of the protective scope of the business judgment rule so that it does not operate as de facto immunity for directors.

Keywords: Minority Shareholders, Derivative Action, Business Judgment Ru